

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tidak bisa ditafikan bahwa dunia saat ini mereda dan mengalami suatu era yang disebut sebagai VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity). Nathan Benat menerangkan “Situasi sekarang begitu kentara tergambar dalam kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian, perubahan yang cepat, serta kompleksitas yang semakin meningkat.”¹ Dalam konteks pendidikan, VUCA menuntut adanya adaptasi yang cepat terhadap perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, serta dinamika sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus mampu membekali individu dengan kemampuan berpikir kritis, fleksibilitas dalam mengambil keputusan, serta daya tahan dalam menghadapi tantangan yang tidak terduga.

Untuk dapat menghadapi tantangan dalam era VUCA, manusia dituntut memiliki kecerdasan yang teriris pada aspek intelektual, emosional dan spiritual. Goelman menerangkan bahwa “Kecerdasan intelektual diperlukan untuk menganalisis permasalahan, kecerdasan emosional membantu individu dalam mengelola emosi serta berinteraksi, sementara kecerdasan spiritual memberikan makna dalam tindakan dan keputusan.”² Ketiga aspek kecerdasan ini harus dikembangkan secara seimbang agar individu dapat beradaptasi secara optimal dalam menghadapi dinamika kehidupan yang semakin kompleks.

Dalam perkembangan hidup manusia, pendidikan menjadi instrumen utama dalam membentuk kecerdasan yang dibutuhkan dalam menghadapi era VUCA. Tilaar berpandangan bahwa “Melalui pendidikan, individu memperoleh beberapa hal seperti pengetahuan akademik, keterampilan berpikir kritis, komunikasi yang

¹ Nathan Bennett and G James Lemoine, “What a Difference a Word Makes: Understanding Threats to Performance in a VUCA World,” *Jurnal Business Horizons* 57:3 (Maret, 2014), 2

² Daniel Goleman, “Emotional Intelligence. Why It Can Matter More than IQ.,” *Journal Learning* 24:6 (Juni, 1996), 2

efektif, serta pemahaman etika dan nilai-nilai kehidupan.”³ Sistem pendidikan yang baik harus mampu mengembangkan seluruh potensi manusia secara holistik agar dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat dan menghadapi tantangan masa depan dengan kesiapan yang optimal.

Pendidikan, dalam perspektif yang lebih luas, dapat didefinisikan sebagai proses sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara optimal melalui berbagai pengalaman belajar. Murtadha Muthahhari, menerangkan bahwa “Pendidikan mencakup seluruh upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada individu agar mereka dapat menjalani kehidupan secara produktif dan bermakna.”⁴

Tujuan pendidikan selain untuk penguasaan ilmu pengetahuan, adalah pembentukan karakter dan moral yang kuat. Rusdiana mengemukakan bahwa “Pendidikan harus bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada dalam diri anak agar mereka menjadi manusia yang bermartabat dan berkepribadian luhur.”⁵ Pendidikan yang ideal seharusnya menghasilkan individu yang memiliki wawasan luas, mampu berpikir kritis, serta memiliki kesadaran sosial dan spiritual yang tinggi. Dengan demikian, pendidikan menjadi pondasi utama dalam membangun peradaban yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Di Indonesia, tujuan pendidikan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menyatakan bahwa “Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga

³ Henry Alexis Rudolf Tilaar, *Perubahan Sosial Dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia* (Jakarta Pusat: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002). 9.

⁴ Ayyatullah Murtadha Muthahhari, *Dasar-Dasar Epistemologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Sadra Press, 2011). 43.

⁵ H Sanusi Uwes dan H A Rusdiana, *Sistem Pemikiran Manajemen Pendidikan: Alternatif Memecahkan Masalah Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2017). 4.

negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”⁶ Visi ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia memiliki arah pembentukan karakter dan moral peserta didik.

Rifai menerangkan bahwa “Pada ranah manajemen, visi dan misi, serta sebuah kebijakan, memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan di setiap jenjang. Visi-misi seharusnya menjadi pedoman bagi institusi pendidikan dalam menjalankan proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah.”⁷ Dengan adanya visi dan misi yang kuat, institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional.

Melihat urgensi dan sentralitas visi-misi serta sebuah kebijakan dalam pendidikan. Maka dua aspek ini harus didasarkan pada permusan dan perencanaan yang matang. Argumen ini, prinsipnya terisyarat dan senada dengan Q.S. Al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Ayat dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 menekankan pentingnya perencanaan dalam kehidupan, terutama dalam mempersiapkan diri untuk hari esok, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu harus memperhatikan tindakan dan keputusan yang diambil, karena segala sesuatu memiliki konsekuensi di masa depan.

Pada ranah pendidikan, Q.S. Al-Hasyr memberikan isyarat dan prinsip yang menunjukkan bahwa sistem pendidikan harus dirancang dengan visi yang jelas dan

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003,” *Pemerintah Republik Indonesia*, 2003.

⁷ Muhammad Rifa’i, *Manajemen Organisasi Pendidikan* (Malang: Humanis Publishing, 2019). 3.

kebijakan yang matang. Visi-misi dan kebijakan pendidikan bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi harus menjadi pedoman yang terencana dan berorientasi jangka panjang. Pendidikan yang tidak memiliki perencanaan yang baik akan cenderung berjalan tanpa arah yang jelas, sehingga hasilnya tidak optimal bagi peserta didik dan masyarakat secara luas.

Pada titik ini, berbicara tentang pendidikan Indonesia. Terpotret suatu realitas bahwa pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Menurut Anisa “Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah, rendahnya kualitas tenaga pendidik, serta sistem pendidikan yang lebih menekankan pada aspek kognitif dibandingkan dengan aspek afektif dan psikomotorik.”⁸ Selain itu, kurangnya integrasi antara nilai-nilai filosofis dalam perumusan visi-misi dan kebijakan pendidikan, hal ini menyebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memiliki landasan yang kuat, sehingga implementasinya kurang efektif. Dampak lebih lanjutnya dari situasi itu adalah rendahnya daya saing pendidikan Indonesia di tingkat global serta belum optimalnya pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan Indonesia, saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar yang menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Budi Rahayu melihat “Salah satu tantangan utama adalah disparitas kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang dipengaruhi oleh faktor infrastruktur, ketersediaan tenaga pendidik berkualitas, serta akses terhadap teknologi dan sumber belajar.”⁹ Selain itu, Sania Palupi, juga memandang bahwa “Kurikulum yang sering berubah tanpa kajian mendalam menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem pendidikan, sehingga peserta didik dan tenaga pengajar sulit menyesuaikan

⁸ Anisa Amalia Maisaroh and Sri Untari, “Transformasi Pendidikan Karakter Melalui Kebijakan Pemerintah Di Indonesia Menuju Generasi Emas 2045” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 7:1 (Juni, 2024), 2.

⁹ Tuti Budirahayu, *Kesenjangan Kualitas Pendidikan Di Indonesia*, 2021. 5.

diri dengan perubahan tersebut.”¹⁰ Kualitas pendidikan yang masih di bawah standar internasional juga tampak dalam hasil asesmen kompetensi siswa, seperti Programme for International Student Assessment (PISA), yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia.¹¹

Berdasarkan data Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2023, “Kemampuan literasi, matematika, dan sains siswa Indonesia berada pada peringkat 72 dari 79 negara, dengan skor rata-rata yang masih jauh di bawah standar internasional.”¹². Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan signifikan antara tujuan pendidikan nasional dan hasil yang dicapai. Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada angka 72,91, yang meskipun mengalami peningkatan, masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand. Kesenjangan kualitas pendidikan ini semakin nyata ketika melihat perbedaan fasilitas dan kompetensi guru antara daerah perkotaan dan pedesaan, di mana 40% sekolah di daerah terpencil masih mengalami keterbatasan akses terhadap teknologi dan sumber belajar.”¹³

Data-data ini memperkuat urgensi perlunya landasan filsafat pendidikan yang kuat dalam perumusan visi-misi dan kebijakan pendidikan, khususnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN), agar mampu menghasilkan lulusan yang kompeten secara intelektual, emosional, dan spiritual serta siap menghadapi era VUCA.

Pada tataran ideal, seharusnya pendidikan mampu mencetak individu yang berdaya saing dan memiliki keterampilan relevan dengan kebutuhan zaman, tapi faktanya pendidikan Indonesia masih menghasilkan lulusan yang belum siap menghadapi tantangan dunia kerja dan perubahan global.¹⁴ Hal ini menunjukkan

¹⁰ Sania Palupi, “Dinamika Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Pada Tahun 1945-1965,” *Jurnal Risalah*, 5:5 (Mei: 2018), 4.

¹¹ Lisa De Bortoli, Catherine , and Thomson, “PISA in Brief 2022: Student Performance and Equity in Education” (Dublin: Australian Council for Educational Research, 2023). 7.

¹² Lisa de Bortoli, *Ibid.* 9

¹³ Badan Pusat Statistik, *Data Indeks Pembangunan Manusia* (Jakarta: BPS, 2022), 5

¹⁴ Iqbal Arraniri et al., *Tantangan Pendidikan Indonesia Di Masa Depan* (Cirebon: Penerbit Insania, 2021). 15.

adanya kesenjangan antara tujuan pendidikan yang ideal dengan realitas hasil pendidikan yang dicapai. Pendidikan yang tidak menghasilkan lulusan berkualitas menandakan adanya permasalahan fundamental dalam sistem yang diterapkan, mulai dari perancangan kurikulum hingga implementasi kebijakan pendidikan.

Di antara penyebab utama dari permasalahan ini adalah bahwa implementasi visi-misi pendidikan yang sering kali tidak sesuai dengan konsep ideal dalam perencanaan. Banyak lembaga pendidikan menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan kebijakan yang seharusnya berlandaskan pada filsafat pendidikan. Beberapa faktor seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman terhadap filsafat pendidikan, serta tekanan administratif sering kali menyebabkan pergeseran fokus dari nilai-nilai pendidikan yang seharusnya dijunjung tinggi.

Selain itu, bagian dari akar masalahnya adalah kebijakan pendidikan di Indonesia sering kali tidak berangkat dari landasan filsafat pendidikan yang kuat. Hal itu diperkuat oleh Abdul Muis “Kebijakan yang diterapkan cenderung pragmatis dan reaktif terhadap perkembangan zaman, tanpa adanya refleksi mendalam mengenai tujuan pendidikan yang ingin dicapai dalam jangka panjang.”¹⁵ Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak memiliki arah yang jelas, serta tidak mampu menjawab tantangan utama yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Pendidikan yang ideal seharusnya memiliki dasar filosofis yang kokoh agar mampu membentuk individu yang memiliki irisan-irisan kecerdasan.

Contoh konkret dari kebijakan pendidikan yang kurang berlandaskan filsafat pendidikan dapat dilihat dari perubahan kurikulum yang dilakukan secara mendadak tanpa kajian menyeluruh. Misalnya, Amrazi menerangkan “Penerapan Kurikulum Merdeka yang bertujuan memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan siswa dalam memilih mata pelajaran, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala dalam hal kesiapan tenaga pengajar dan sarana pendukung.”¹⁶ Selain itu, Yulia menerangkan “Kebijakan asesmen nasional yang menggantikan Ujian

¹⁵ Abdul Muis Daeng Pawero, “Arah Baru Perencanaan Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pendidikan”, *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, 4:1 (Februari, 2021), 7.

¹⁶ Amrazi Zakso, “Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 13:2 (Oktober, 2023), 8.

Nasional dilakukan tanpa persiapan yang matang, sehingga implementasinya di berbagai daerah mengalami kendala teknis dan konseptual.”¹⁷ Kebijakan yang tidak berakar pada filsafat pendidikan ini menyebabkan ketidakselarasan antara kebijakan yang diterapkan dengan realitas di lapangan.

Berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan, seperti inkonsistensi kebijakan, lemahnya internalisasi nilai, serta perbedaan pemahaman di antara para pemangku kepentingan, menunjukkan adanya kesenjangan mendasar dalam perumusan dan implementasi visi-misi serta kebijakan pendidikan. Kesenjangan ini dapat disimpulkan sebagai akibat dari tidak adanya landasan filsafat pendidikan yang kokoh. Tanpa fondasi filosofis, kebijakan pendidikan cenderung bersifat pragmatis, reaktif, dan kehilangan arah yang jelas dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan menjadikan filsafat pendidikan sebagai landasan utama dalam perumusan visi-misi dan kebijakan pendidikan.

Pendekatan ini diperkuat oleh teori Murtadha Muthahhari, yang menegaskan bahwa “Filsafat pendidikan adalah dasar dari seluruh proses pendidikan, termasuk perumusan visi-misi dan kebijakan.”¹⁸ Muthahhari menekankan pentingnya landasan filosofis untuk membentuk manusia yang utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual. Menurutnya, tanpa filsafat yang kuat, kebijakan pendidikan akan kehilangan arah dan hanya berfokus pada aspek teknis semata

Selanjutnya, teori John Dewey dalam *Democracy and Education* menyatakan bahwa “Kebijakan pendidikan harus didasarkan pada filsafat pendidikan yang berpusat pada peserta didik dan bersifat demokratis.”¹⁹ Lebih lanjut, bahwa filsafat memberikan kerangka nilai yang memungkinkan kebijakan pendidikan bermakna secara moral dan sosial. Dengan adanya landasan filsafat,

¹⁷ Yulia Indahri, “Asesmen Nasional Sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional”, *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12:2 (Desember, 2021), 6.

¹⁸ Muthahhari, *Op. Cit*, 10

¹⁹ John Dewey, *Democracy and Education* (New York: Columbia University Press, 2024).

visi-misi pendidikan dapat dirumuskan secara lebih jelas dan konsisten dengan tujuan membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

Pandangan ini juga sejalan dengan Stephen Ball, yang mengkritik kebijakan pendidikan yang bersifat teknokratis dan neoliberal. Ball menerangkan bahwa “Tanpa landasan filsafat pendidikan, kebijakan cenderung terjebak pada logika pasar dan mengabaikan nilai-nilai humanistik serta moral.”²⁰ Simpulan dari itu, pendidikan harus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan agar kebijakan tersebut memiliki arah yang jelas dan sesuai dengan nilai-nilai fundamental pendidikan.

Filsafat pendidikan memiliki peran fundamental dalam membentuk arah dan tujuan pendidikan di suatu lembaga. Dengan adanya filsafat pendidikan yang jelas, kebijakan yang dirumuskan akan memiliki dasar yang kuat dalam menentukan metode pembelajaran, kurikulum, serta evaluasi pendidikan.²¹ Filsafat pendidikan membantu dalam menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dalam proses pendidikan, sehingga pendidikan mampu berorientasi pada aspek akademik, pembentukan karakter, serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

Lebih lanjut, filsafat pendidikan berperan dalam mengarahkan lembaga pendidikan untuk tidak fokus pada batasan aspek-aspek teknis dalam proses pembelajaran, filsafat pendidikan memiliki peran untuk memahami esensi dari pendidikan itu sendiri. Sintia menerangkan “Pendidikan yang berlandaskan filsafat akan lebih mampu dalam menjawab tantangan zaman, karena memiliki landasan pemikiran yang kokoh dalam menghadapi dinamika sosial dan budaya.”²² Dengan demikian, penerapan filsafat pendidikan dalam kebijakan pendidikan akan memberikan dampak positif dalam membentuk sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan berorientasi pada pembangunan manusia secara holistik.

²⁰ Stephen J Ball, *Education Policy and Social Class: The Selected Works of Stephen J. Ball* (East Sussex: Psychology Press, 2005). 13

²¹ Toto Suharto and K R Rose, *Filsafat Pendidikan Islam: Menguatkan Epistemologi Islam Dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020). 16

²² Sinta Rusmalinda et al., *Filsafat Manajemen Pendidikan Islam* (Kabupaten Bandung: CV. Widina Media Utama, 2023). 4.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebagai bagian dari pendidikan menengah berbasis Islam memiliki posisi strategis dalam pengembangan pendidikan nasional. Sebagai institusi pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum nasional dengan pendidikan agama, MAN menghadapi tantangan unik dalam merancang kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara standar akademik nasional dengan nilai-nilai Islam. Pada tataran ini, kebijakan pendidikan di MAN berorientasi pada beberapa hal, seperti peningkatan kompetensi akademik siswa, pembentukan karakter dan spiritualitas yang selaras dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap filsafat pendidikan menjadi sangat penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan visi-misi lembaga pendidikan ini.

Sebagai salah satu pusat pendidikan dan inovasi di Jawa Barat, Kota Bandung menghadapi berbagai tantangan dalam perumusan serta implementasi visi-misi dan kebijakan pendidikan, termasuk di madrasah yang harus menyeimbangkan tuntutan akademik dengan nilai-nilai keislaman. Dinamika perkembangan sosial, budaya, dan teknologi di kota ini menuntut sistem pendidikan yang adaptif serta berorientasi pada pengembangan kompetensi abad ke-21. Tantangan ini semakin kompleks karena adanya kebutuhan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman tanpa mengabaikan relevansi pendidikan dalam menghadapi era modern.

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 27 November 2025, di Kota Bandung terdapat dua Madrasah Aliyah Negeri, yaitu MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung. Berdasarkan observasi awal dalam pra-penelitian, kedua madrasah ini dipandang oleh penulis memiliki keunikan masing-masing dalam pendekatan pendidikan yang diterapkan. Di mana, MAN 1 Kota Bandung dikenal dengan program unggulannya yang mengedepankan keseimbangan antara akademik, keagamaan, dan pengembangan karakter siswa. Program-program yang diterapkan di madrasah ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual, serta memiliki integritas moral yang tinggi. Sementara itu, MAN 2 Kota Bandung memiliki reputasi dalam inovasi pendidikan, terutama dalam penerapan kurikulum berbasis keterampilan abad ke-21. Madrasah ini berupaya

mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran modern dengan nilai-nilai Islam, sehingga siswanya mampu bersaing dalam berbagai bidang di tingkat nasional maupun internasional.

Keunikan yang dimiliki oleh MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung, sejauh penelaahan penulis, mengindikasikan adanya landasan filsafat tertentu dalam perumusan kebijakan dan implementasi visi-misinya. Kedua madrasah ini menjadi contoh nyata bagaimana pemahaman filsafat pendidikan berperan dalam membentuk arah kebijakan pendidikan yang diterapkan di lingkungan madrasah. Pemilihan lokus studi di MAN 1 dan MAN 2 dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pemahaman filsafat pendidikan mempengaruhi perumusan serta pelaksanaan visi-misi dan kebijakan, serta sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian kualitas pendidikan Islam yang ideal. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai relevansi filsafat pendidikan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan di madrasah berbasis Islam.

Dari masalah yang ada, terlihat bahwa penelitian ini memiliki urgensi yang mana filsafat pendidikan harus menjadi landasan dalam perumusan visi-misi dan kebijakan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Tanpa landasan filosofis yang kokoh, kebijakan pendidikan cenderung bersifat pragmatis dan reaktif terhadap perubahan tanpa arah yang jelas, sehingga berpotensi gagal menjawab tantangan era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Selain itu, kesenjangan antara nilai-nilai Islam yang menjadi identitas madrasah dengan tuntutan kompetensi abad ke-21 menuntut adanya integrasi yang seimbang dan terencana. Dengan mengkaji peran filsafat pendidikan dalam membentuk arah kebijakan di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih bermakna, terarah, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Urgensi ini semakin mengemuka mengingat permasalahan seperti ketimpangan kualitas pendidikan, lemahnya internalisasi nilai, dan rendahnya daya saing pendidikan Indonesia di tingkat global yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi sistem pendidikan nasional.

Berangkat daripada pemaparan itu, penulis tergugah untuk mengkaji lebih lanjut dan melaksanakan penelitian berjudul “*Kajian Filsafat Pendidikan dalam Implementasi Visi-Misi dan Perumusan Kebijakan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri se-Kota Bandung*”.

B. Rumusan Masalah

Pada bagian pendidikan formal di Indonesia, visi dan misi lembaga pendidikan seringkali disusun sebagai dokumen administratif yang bersifat normatif tanpa sepenuhnya merefleksikan pemikiran filosofis yang mendalam. Padahal, dalam kerangka filsafat pendidikan, visi dan misi seharusnya menjadi cerminan dari orientasi nilai, pandangan tentang manusia, pengetahuan, serta tujuan hakiki pendidikan itu sendiri. Ketika visi-misi tidak dilandaskan pada filsafat pendidikan yang kuat, maka implementasi kebijakan yang menyertainya pun rentan bersifat pragmatis, reaktif, dan kehilangan arah idealnya.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebagai lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama RI memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik yang unggul secara intelektual, spiritual, dan moral. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara rumusan visi-misi dengan praktik kebijakan yang diterapkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana filsafat pendidikan benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan visi, misi, dan perumusan kebijakan pendidikan di madrasah. Kurangnya integrasi antara aspek filosofis dan operasional juga dapat berimplikasi pada kualitas pelaksanaan pendidikan dan pencapaian tujuan institusional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis bagaimana filsafat pendidikan diimplementasikan dalam penyusunan visi-misi dan kebijakan pendidikan, khususnya di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung.

1. Bagaimana pemikiran filosofis teraktualisasi dalam proses perumusan visi dan misi pendidikan di MAN 1 dan 2 Kota Bandung?

2. Dalam bentuk apa filsafat pendidikan tercermin dalam kebijakan pendidikan yang dirumuskan dan diimplementasikan di MAN 1 dan 2 Kota Bandung?
3. Faktor-faktor apa yang memengaruhi keberlangsungan integrasi antara filsafat pendidikan dengan visi, misi, dan kebijakan pendidikan di MAN 1 dan 2 Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara pemahaman filsafat pendidikan dengan proses perumusan visi-misi serta kebijakan pendidikan di MAN Kota Bandung. Mengingat filsafat pendidikan memiliki peran mendasar dalam membentuk arah dan kebijakan suatu lembaga pendidikan, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana pemahaman tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan madrasah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menelaah proses perumusan visi dan misi pendidikan di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung berdasarkan perspektif filsafat pendidikan.
2. Mengkaji bentuk-bentuk aktualisasi filsafat pendidikan dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung.
3. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan integrasi antara nilai-nilai filosofis dengan visi, misi, dan kebijakan pendidikan di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis, dalam memahami peran filsafat pendidikan terhadap perumusan kebijakan dan visi-misi pendidikan di MAN se-Kota Bandung. Secara lebih rinci, kegunaan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang filsafat pendidikan, khususnya terkait dengan bagaimana pemahaman filsafat pendidikan dapat memengaruhi perumusan kebijakan pendidikan dan visi-misi lembaga pendidikan.

- a. Menambah wawasan keilmuan dalam bidang filsafat pendidikan dan kebijakan pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan Islam di tingkat Madrasah Aliyah Negeri (MAN).
- b. Memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara teori filsafat pendidikan dengan implementasi kebijakan pendidikan.
- c. Memperkuat konsep tentang pentingnya landasan filosofis dalam menyusun kebijakan pendidikan agar lebih berorientasi pada pembangunan manusia secara holistik.

2. Kegunaan Praktis

Selain memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, khususnya di MAN se-Kota Bandung.

a. Bagi Pembuat Kebijakan Pendidikan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan di tingkat madrasah, Kementerian Agama, maupun instansi terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih berbasis pada nilai-nilai filosofis, sehingga lebih relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan pendidikan di era VUCA.

b. Bagi Pimpinan dan Pengelola MAN

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menetapkan visi dan misi yang lebih kuat serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era modern. Dengan memahami implikasi filsafat pendidikan, pihak madrasah dapat menyusun strategi yang lebih komprehensif dalam pengelolaan pendidikan.

c. Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penelitian ini dapat membantu para pendidik memahami pentingnya pendekatan filosofis dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas metode pengajaran dan membantu peserta didik dalam mengembangkan pola pikir kritis serta kesadaran akan nilai-nilai kehidupan.

d. Bagi Peserta Didik

Dengan kebijakan pendidikan yang lebih berbasis pada filsafat pendidikan, peserta didik diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang lebih bermakna. Mereka tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan secara akademik, lebih jauhnya mampu mengembangkan karakter, kreativitas, dan daya pikir kritis yang lebih baik.

e. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi atau peneliti yang tertarik untuk mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai hubungan antara filsafat pendidikan dan kebijakan pendidikan, baik di tingkat madrasah maupun institusi pendidikan lainnya.

E. Batasan Masalah dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, penulis menyadari adanya keterbatasan dalam hal mobilitas dan waktu, sehingga diperlukan penentuan ruang lingkup yang jelas agar penelitian dapat dilakukan secara lebih fokus dan mendalam. Selain itu, untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman konsep-konsep yang digunakan, penelitian ini juga akan dipaparkan definisi operasional dari istilah-istilah yang menjadi bagian utama dalam kajian ini. Dengan adanya batasan masalah dan definisi operasional, diharapkan penelitian ini memiliki kejelasan dalam cakupan pembahasan serta akurasi dalam interpretasi data.

1. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, diperlukan batasan yang jelas dalam ruang lingkup kajian. Penelitian ini hanya akan membahas aspek pemahaman filsafat pendidikan yang dimiliki oleh para pemangku kebijakan

di MAN Kota Bandung serta bagaimana pemahaman tersebut berpengaruh terhadap perumusan visi-misi dan kebijakan pendidikan di madrasah tersebut. Adapun batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Subjek Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada pemangku kebijakan di MAN Kota Bandung, seperti kepala madrasah, wakil kepala madrasah, serta pihak lain yang terlibat dalam perumusan visi-misi dan kebijakan pendidikan.

b. Aspek yang Dikaji

Kajian ini hanya akan meneliti pemahaman tentang filsafat pendidikan serta kaitannya dengan implemtasi visi-misi dan kebijakan pendidikan, tanpa membahas aspek implementasi kebijakan secara lebih luas.

c. Ruang Lingkup Lokasi

Penelitian ini terbatas pada MAN yang berada di wilayah Kota Bandung, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke MAN di daerah lain.

d. Konteks Waktu

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan berfokus pada kondisi terkini dalam kurun waktu penelitian yang telah ditentukan.

2. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi konsep yang digunakan dalam penelitian ini, berikut adalah definisi operasional dari variabel utama yang diteliti:

a. Pemahaman Filsafat Pendidikan

Kemampuan individu, terutama tenaga pendidik dan pembuat kebijakan, dalam memahami konsep dasar, aliran, dan prinsip-prinsip filsafat pendidikan yang digunakan dalam praktik pendidikan di madrasah.

b. Kebijakan Pendidikan

Proses penyusunan aturan, strategi, dan kebijakan pendidikan di MAN se-Kota Bandung yang didasarkan pada pemahaman filsafat pendidikan.

c. Visi dan Misi Pendidikan

Pernyataan resmi madrasah yang menggambarkan tujuan jangka panjang serta arah pengembangan pendidikan, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai filsafat pendidikan yang dianut.

F. Kerangka Pemikiran

Pendidikan sebagai institusi sosial dan praksis kultural senantiasa bertaut erat dengan filsafat, karena filsafat menyediakan kerangka normatif dan arah teleologis bagi segala aktivitas pendidikan. Dalam pemikiran John Dewey, pendidikan adalah transmisi pengetahuan, serta proses rekonstruksi pengalaman yang diarahkan oleh nilai-nilai tertentu.²³ Oleh karena itu, visi-misi lembaga pendidikan bukan hanya slogan administratif, tetapi representasi dari nilai filosofis yang diyakini dan hendak diwujudkan. Visi yang disusun secara dangkal tanpa landasan filosofis akan melahirkan kebijakan yang reaktif dan terputus dari cita ideal pendidikan.

Pada tataran madrasah, landasan filosofis menjadi semakin penting mengingat posisi madrasah sebagai lembaga yang membawa mandat ganda, dalam hal ini nilai-nilai keislaman dan kebutuhan modernitas. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional harus menjabarkan visimisinya dengan mempertimbangkan dualitas identitas ini. Al-Attas, menekankan bahwa pendidikan Islam harus mampu menyinergikan antara wahyu dan akal, bukan menjadikan keduanya saling bertentangan.²⁴ Maka, kerangka filsafat pendidikan Islam menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan

²³ John Dewey, "Experience And Education: Pendidikan Berbasis Pengalaman," *Jakarta: Teraju*, 2004.

²⁴ Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam* (Muslim Youth Movement of Malaysia Kuala Lumpur, 1980).

madrasah, agar tidak terjebak dalam dikotomi antara tradisionalisme dan tuntutan kontemporer.

Sayangnya, dalam praktik kelembagaan di banyak MAN, visi-misi sering kali disusun tanpa kajian filosofis yang mendalam. Visi yang hanya bersandar pada jargon populer seperti “unggul” atau “berdaya saing global” kerap kehilangan makna substansial ketika tidak ditopang oleh prinsip filosofis yang jelas. Menurut Nasution, visi pendidikan yang kuat harus bertolak dari pemahaman tentang hakikat manusia, ilmu, dan tujuan hidup. Tanpa ini, orientasi pendidikan menjadi kabur, dan kebijakan yang diambil cenderung bersifat pragmatis jangka pendek.²⁵

Filsafat pendidikan menyediakan instrumen reflektif untuk mengkritisi apakah kebijakan pendidikan benar-benar mewujudkan nilai-nilai yang diklaim dalam visi-misi. Freire, menyebut pentingnya “kesadaran kritis” dalam praksis pendidikan, di mana peserta didik dan lembaga penyelenggara pendidikan mesti menyadari struktur ideologis yang menyelubungi sistem kebijakan.²⁶ Jika kebijakan pendidikan hanya dipahami secara administratif, maka peran filsafat sebagai refleksi atas nilai dan makna menjadi terpinggirkan.

Dalam implementasi visi-misi, kebijakan pendidikan sering kali mengalami reduksi menjadi sekadar program dan indikator kerja, bukan elaborasi nilai-nilai transenden. Hal ini dapat dilacak pada banyak dokumen kebijakan di MAN, yang lebih menekankan output kuantitatif ketimbang proses pembentukan karakter. Menurut Tilaar, kebijakan pendidikan di Indonesia rentan mengalami “deideologisasi” akibat tekanan globalisasi dan birokratisasi yang memarjinalkan nilai-nilai filosofis.²⁷ Maka diperlukan refleksi mendalam terhadap bagaimana filosofi pendidikan diterjemahkan ke dalam kebijakan di tingkat madrasah.

Di sinilah pentingnya merancang visi-misi dan kebijakan pendidikan dengan pendekatan yang bersifat reflektif-filosofis. Perumusan visi yang baik bukan hanya menyatakan tujuan, tetapi merepresentasikan konsepsi ontologis dan

²⁵ Abdusima Nasution, “Filsafat Pendidikan Islam” (PT. Nasmedia Indonesia, 2022).

²⁶ Paulo Freire, “Pedagogy of the Oppressed,” in *Toward a Sociology of Education* (Routledge, 2020), 374–86.

²⁷ Tilaar, *Perubahan Sosial Dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*.

aksiologis dari pendidikan itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Nel Noddings, teori pendidikan harus menjelaskan apa yang seharusnya diajarkan (axiology), mengapa hal itu penting (epistemology), dan bagaimana mengajarkannya (praxis).²⁸ Ketiga dimensi ini harus hadir dalam setiap perumusan kebijakan agar tidak bersifat seremonial semata.

Penelitian ini menyoroti bagaimana MAN di Kota Bandung mengimplementasikan visi-misinya dan merumuskan kebijakan pendidikan berdasarkan atau tidak berdasarkan kerangka filsafat pendidikan. Fenomena ini relevan karena cerminan kualitas pendidikan sangat terkait erat dengan konsistensi antara nilai filosofis dan realitas kebijakan. Ketika perumusan kebijakan tidak merefleksikan nilai-nilai ideal dalam visi, maka yang terjadi adalah kesenjangan antara dokumen dan praktik. Fenomena inilah yang menjadi locus dari problem epistemologis dalam penelitian ini.

Kajian ini berpijak pada asumsi bahwa filsafat pendidikan dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam membaca keselarasan antara arah normatif lembaga (visi-misi) dan arah praktis (kebijakan pendidikan). Daripada itu, dapat ditarik suatu simpulan bahwa pendidikan tanpa filsafat, diibartkan kapal tanpa kompas, di mana kapal bergerak akan tetapi dengan arah yang tidak tentu. Maka, pemetaan terhadap integrasi atau justru fragmentasi antara visi-misi dan kebijakan di MAN akan memperlihatkan sejauh mana kesadaran filosofis hadir dalam pengelolaan pendidikan di tingkat kelembagaan.

Dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif melalui studi kasus di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung, penelitian ini berupaya menelusuri secara mendalam bagaimana kerangka filsafat pendidikan dihadirkan, atau justru diabaikan dalam perumusan visi-misi dan kebijakan kelembagaan. Pendekatan ini memungkinkan penggalian makna dan motif di balik kebijakan, bukan sekadar menilai dokumen formal secara permukaan. Sebagaimana ditegaskan oleh Moleong, pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi pemahaman atas dunia makna yang hidup dalam

²⁸ Nel Noddings, *Philosophy of Education* (Routledge, 2018).

pikiran, tindakan, dan interaksi pelaku pendidikan.²⁹ Maka, fokus penelitian ini bukan hanya untuk mendeskripsikan kebijakan, tetapi menginterpretasikan sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan refleksi filosofis atau justru terjebak dalam rutinitas birokratis tanpa arah normatif yang jelas.



²⁹ Lexy J Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi),” *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2017, 102–7.